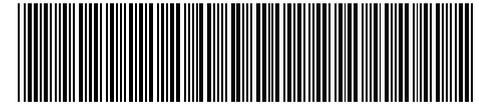




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693144/2025**



DS:1484-9360-0918-3535

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
3. Provinsi : (25) PAPUA
4. Kode/Nama Satker : (693144) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
- Sebesar : Rp. 443.752.000 (EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.12.WA Program Dukungan Manajemen
135.12.WA. Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 443.752.000
Rp. 443.752.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	443.752.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 443.752.000

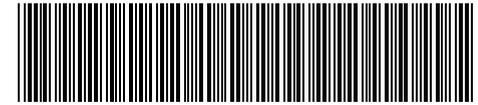
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693144/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1484-9360-0918-3535

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (693144) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen			443.752.000
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah			443.752.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4,00	Rekomendasi Kebijakan	418.675.000
Rincian Output	:	01	ABD.001 Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	4,00	Rekomendasi Kebijakan	418.675.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	150,00	orang	25.077.000
Rincian Output	:	01	AEF.001 Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	150,00	orang	25.077.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.12.2.693144/2025

I B. SUMBER DANA



DS:1484-9360-0918-3535

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
 Provinsi : (25) PAPUA
 Kode>Nama Satker : (693144) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : I B. 1

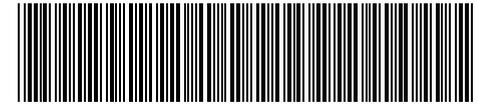
					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	443.752.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	443.752.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693144/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1484-9360-0918-3535

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (693144) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693144	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA	-	443.752	-	-	-	443.752		
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	443.752	-	-	-	443.752		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	443.752	-	-	-	443.752		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	418.675	-	-	-	418.675	25 . 51	
01	RM	-	418.675	-	-	-	418.675	063@	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	25.077	-	-	-	25.077	25 . 51	
01	RM	-	25.077	-	-	-	25.077	063@	
JUMLAH		-	443.752	-	-	-	443.752		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693144/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1484-9360-0918-3535

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (693144) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

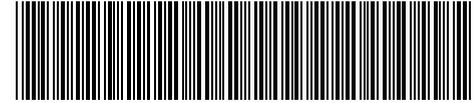
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693144	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	420.763	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.109	443.752
		BELANJA BARANG	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	420.763	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.109	443.752
	135.12.WA.7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	420.763	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.109	443.752
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	420.763	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.109	443.752

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693144/2025
IV A. B L O K I R**



DS:1484-9360-0918-3535

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [693144] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693144	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.500
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 343.752		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 343.752		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.12.WA 7143	Program Dukungan Manajemen		
	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.750		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 299.729		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.750		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.023		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693144/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:1484-9360-0918-3535

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [693144] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001